

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku manusia, pelayanan kesehatan, serta hereditas merupakan faktor yang mempengaruhi mutu kesehatan. Faktor utama yang paling mempengaruhi mutu kesehatan yaitu lingkungan dan perilaku. Dalam mewujudkan mutu kesehatan diperlukan pembangunan kesehatan yang merupakan suatu usaha yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan tingkat kesadaran, keinginan, dan kemauan dalam hidup sehat bagi tiap perorangan.

Pada dasarnya yang membuat sanitasi ini berhasil atau tidaknya adalah Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah di suatu desa, Tenaga Kesehatan seperti bagian dari puskesmas serta yang paling berperan dalam proses pencapaian sanitasi ini adalah masyarakat itu sendiri, sebab terbangun atau tidaknya suatu jamban sebagai bentuk sanitasi Stop BABS adalah kemauan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri.

Stop BABS merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kesehatan, salah satunya adalah bagi masyarakat di Desa Perkotaan. Desa Perkotaan terdiri dari empat dusun yaitu Dusun I Toba, Dusun II Kebun Kapas, Dusun III Banjar dan Dusun IV Melayu. Dusun I Banjar belum menerapkan Stop BABS karena rendahnya ekonomi sehingga tidak memiliki dana untuk membuat jamban dan kondisi lingkungan yang dekat dengan parit (irigasi) maka masyarakat dusun I Toba BAB nya di parit. Kemudian Dusun III Banjar belum menerapkan Stop BABS dikarenakan faktor ekonomi rendah, tidak memiliki dana untuk membuat

jamban, dan kebiasaan menggunakan jamban cemplung. Maka dari itu peneliti melakukan observasi di Desa Perkotaan melalui wawancara dan observasi, pada 25 Januari 2021 merupakan desa yang termasuk dalam mempunyai permasalahan dalam sanitasi dan perilaku hidup sehat yang rendah, dimana didapatkan bahwa masih adanya masyarakat yang mempunyai perilaku dalam pembuangan tinja yang tidak baik dan masih terdapatnya masyarakat yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS). Oleh karena itu masih banyaknya masyarakat yang buang air besar sembarangan di sekitaran parit dan penggunaan jamban cemplung dikarenakan kurangnya masyarakat dalam memperoleh jamban sehat.

Indonesia masih mempunyai permasalahan dalam perilaku manusia, pelayanan kesehatan, serta hereditas. Berdasarkan RISKESDAS pada tahun 2010 menunjukkan bahwa di Indonesia sebesar 6,7% masyarakat menumpang pada tetangga untuk BAB, sebesar 25% masyarakat menggunakan jamban tidak sehat dan sebesar 17,7% masyarakat Indonesia membuang BAB pada sembarangan tempat. Pada tahun 2015-2019 Indonesia telah membangun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) sebesar 100% bebas mempunyai target dalam mengakses air minum, sebesar 0% bebas dari pemukiman kumuh dan BABS. Sebesar 20,5% pada saat ini Indonesia masih di catat sebagai desa ODF (*open defecation free*).

Menurut hasil survei yang dilakukan di Desa Perkotaan bahwa Desa Perkotaan adalah desa yang belum sepenuhnya menerapkan Stop BABS. Didapatkan data Jumlah KK (Kepala Keluarga) di Desa Perkotaan sebanyak 467 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 1658 jiwa. Masih ada sekitar 25% masyarakat

yang belum menerapkan Stop BABS, yakni dengan jumlah kepala keluarga yang belum Stop BABS sebanyak 18 keluarga, dengan jumlah keseluruhan jiwa sebanyak 70 jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa faktor yang menjadi alasan sebagian warga Desa Perkotaan yang belum menerapkan Stop BABS, yakni rata-rata penduduk Desa Perkotaan yang tinggal di pinggiran parit membuat jamban yang di bangun di dekat parit. Hal ini karena limbah yang berupa air bekas cucian atau mandi dan tinja dapat dialirkan langsung ke parit melalui pipa, karena kemungkinan keterbatasan lahan untuk membuat septic tank, parit dijadikan alternatif untuk membuang segala limbah yang bersumber dari jamban/WC. Akibat tidak tersedianya septic tank membuat masyarakat membuang hasil dari tinja sehari-hari ke parit, sehingga parit pun tercemar. Setelah ditelusuri parit tersebut merupakan parit yang dipergunakan sehari-hari oleh para petani setempat untuk mengairi sawah mereka. Selain itu juga tercemarnya kondisi parit, tampak dari warna air kuning kehitaman dan berbau tidak sedap yang diakibatkan oleh air limbah dari jamban/WC penduduk yang bermukim disekitarnya.

Hasil wawancara awal sebelum penelitian dengan beberapa warga setempat bahwa masyarakat daerah tersebut memiliki jamban tetapi tidak memiliki septic tank, kurangnya lahan atau tidak tersedianya lahan untuk membuat septic tank, maka dialirkan ke parit melalui pipa. Ada dugaan program Stop BABS belum diterapkan disebabkan ekonomi masyarakat yang rendah, tidak adanya lahan untuk membuat septic tank, serta kurangnya perhatian dari pemerintah dan Tenaga Kesehatan di Desa Perkotaan itu sendiri. Padahal banyak

sekali dampak negatif yang akan terjadi di Desa Perkotaan apabila masyarakat belum menerapkan Stop BABS diantaranya, sumber air minum dan makanan yang terkontaminasi dan tercemar yang dapat mengakibatkan masyarakat menderita diare, cacangan, dan banyaknya anak balita yang menderita pneumonia akibat dari tinja yang mengakibatkan pencemaran udara sehingga banyaknya anak balita yang terganggu dalam masalah pernafasannya mengakibatkan tumbuh kembang anak menjadi terganggu.

Berdasarkan peraturan Bupati Batu-Bara Nomor 3 tahun 2016 bahwa stop dalam perilaku buang air besar sembarangan merupakan salah satu perilaku agar masyarakat tidak membuang tinja sembarangan. Dengan adanya jamban sehat maka perilaku buang air besar sembarangan dapat dicegah yang akan dapat membuat lingkungan tidak tercemar serta menjadi sehat dan tidak ada lagi vector pembawa penyakit yang dapat menularkan kepada manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bendahara desa di Desa Perkotaan, menyatakan bahwa sebelumnya di tahun 2019 anggaran dana untuk Stop BABS ada, sebesar 50 juta untuk 5 KK saja. Masing-masing menerima bantuan sebesar 10 juta untuk membuat jamban dan septic tank. Anggaran dana ini sendiri diambil dari APBN dan APBD. Namun semenjak tahun 2020 anggaran dana untuk Stop BABS sudah dihapuskan, dikarenakan pemerintah lebih memfokuskan untuk anggaran bantuan dana covid berupa Bantuan Dana Langsung Tunai (BLT). Sehingga program Stop BABS tidak berjalan dengan baik di Desa Perkotaan ini sendiri, dikarenakan tidak ada anggaran dana untuk Stop BABS maka kepala desa hanya bisa melakukan

penyuluhan, memberikan arahan agar masyarakat mau berusaha untuk membuat jamban dan septic tank sendiri.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Camat di Indrapura, hasil risetnya adalah bahwa pendanaan untuk Stop BABS itu memang ada namun karena saat ini sedang gencar-gencarnya Covid jadi pemerintah melakukan sosialisasi kepada kepala desa untuk mengalihkan dana Stop BABS sebagai dana untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) akibat dampak Covid, tugas camat sendiri adalah memverifikasi anggaran dana yang diajukan dari desa ke kecamatan yang nantinya akan diajukan ke dinas pemberdayaan masyarakat (PMD), selain itu kecamatan juga bertugas memberikan arahan kepada Kepala Desa dan petugas puskesmas untuk melakukan sosialisasi tentang Stop BABS.

Nina dan Indan (2016) dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Program Sanitasi Total Dan Pemasaran Sanitasi Di Desa Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro” menyebutkan bahwa rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, adanya dana yang minim, adanya sosial dan ekonomi yang rendah, tidak adanya denda berupa sanksi membuat kebijakan stop BABS menjadi terhambat dan mengakibatkan implementasi tersebut tidak berjalan.

Hasil penelitian Ahmadi (2019) menyatakan bahwa kurangnya dukungan dari pemerintah lokal, agen pelaksana program, ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, hingga faktor lingkungan, ekonomi dan sosial-politik membuat program tidak dapat berjalan dengan baik sehingga tidak dapat terwujudnya cita-cita yang diinginkan.

Kondisi ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui “Peran Kepala Desa Dan Tenaga Kesehatan Serta Masyarakat Dalam Menerapkan Program Stop BABS di Desa Perkotaan”.

1.2 Fokus Kajian Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Kepala Desa dalam menerapkan program Stop BABS di Desa Perkotaan?
- b. Bagaimana peran Tenaga Kesehatan Puskesmas Indrapura dalam menerapkan program Stop BABS di Desa Perkotaan?
- c. Bagaimana peran masyarakat dalam keikutsertaan menerapkan program Stop BABS di Desa Perkotaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa dan Tenaga Kesehatan dalam menerapkan program Stop BABS di Desa Perkotaan

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam menerapkan program Stop BABS di Desa Perkotaan.
- b. Untuk mengetahui peran Tenaga Kesehatan Puskesmas Indrapura dalam menerapkan program Stop BABS di Desa Perkotaan.
- c. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam menerapkan program Stop BABS di Desa Perkotaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Kepala Desa

Sebagai penginformasi mengevaluasi dalam menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat khususnya program Stop BABS serta jadi bahan perbaikan bagi program itu guna meningkatkan Kesehatan lingkungan di Desa Perkotaan.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya Stop BABS di lingkungan dan memicu kesadaran masyarakat agar selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, serta tidak BAB sembarangan dan menerapkan Stop BABS di lingkungan masyarakat.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi tambahan dan referensi seputar masalah BABS dan sebagai bahan bandingan untuk peneliti lebih lanjut.

d. Bagi Peneliti

Penelitian harapannya bisa peroleh cakrawala baru serta menambah ilmu tentang peran Kepala Desa dan Tenaga Kesehatan dalam menerapkan program Stob BABS di Desa Perkotaan.